



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

(L K J I P)

**TAHUN
2018**



**SELAT PANJANG
2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karuniaNya jualah kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 dengan baik.

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Akhirnya saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini. Semoga AllahSWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Selatpanjang, 29 Januari 2019

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Kepulauan Meranti



Drs. ASRORUDIN, M.SI

NIP. 19670204 199503 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum	2
1.3 Tugas dan Fungsi	4
1.4 Isu Strategis	6
1.5 Landasan Hukum	7
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Rencana Strategis	10
2.2 Indikator Kinerja Utama	14
2.3 Perjanjian Kinerja.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	24
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	28
3.3 Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran	31
3.4 Akuntabilitas Keuangan.....	52
BAB IV PENUTUP	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum

Pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, yang mengutamakan azas desentralisasi dimana sebagian besar kewenangan dan urusan pemerintahan berada pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota, memberikan kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan tugas/pekerjaan yang seluas-luasnya dan bertanggung jawab, termasuk penataan perangkat Daerah dan penataan kelembagaan serta dapat

menggerakkan semua organisasi Daerah guna melaksanakan penyelenggaraan pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik.

Pemberian otonomi kepada daerah memungkinkan daerah mampu mengatur rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna, hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Kabupaten Kepulauan Meranti dengan ibukotanya Selatpanjang adalah satu diantara 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau, yang merupakan hasil pemekaran dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Anambas. Pada awalnya Kabupaten Kepulauan Meranti bergabung dengan Kabupeten Bengkalis terdiri dari 5 wilayah Kecamatan, 5 Kelurahan dan 73 Desa. Selanjutnya, dalam perkembangannya sampai dengan tahun 2018 Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki 9 wilayah Kecamatan dengan 5 Kelurahan dan 101 Desa.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu unsur pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana perlu menfokuskan kegiatan pembangunan yang lebih terarah, tepat waktu, tepat mutu dalam rangka mendukung dan mempercepat terwujudnya Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti

yaitu “ Menjadikan Kepulauan Meranti sebagai kawasan Niaga yang maju dan unggul dalam tatanan masyarakat madani”.

1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti yang berkedudukan di jalan Terpadu, adalah perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi dibidang dinas sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- a) Kepala Dinas.
- b) Sekretaris, membawahi:
1. Sub. Bagian Perencanaan Program
 2. Sub. Bagian Keuangan dan perlengkapan
 3. Sub. Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
- c) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari :
1. Seksi Identifikasi Dan Penguatan Kapasitas.
 2. Seksi Pedampingan, Bantuan Stimulan Dan Penataan
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan Dan Restorasi,
- d) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
1. Seksi Pemberdayaan Perempuan
 2. Seksi Seksi Perlindungan Perempuan, Pengurus Utamaan Gender (PUG);
 3. Seksi Perlindungan Anak, Pemenuhan Hak Anak Dan Bina Ketahanan;
- e) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
1. Seksi pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan
 2. Seksi Keluarga Berencana
 3. Seksi ketahanan dan pembinaan kesejahteraan keluarga.
- f) Bidang Rehabilitasi Dan Perlindungan Jaminan Sosial

1. Seksi Rehabilitasi Sosial Dan Perlindungan Jaminan Sosial
 2. Seksi Jaminan Sosial Dan Keluarga
 3. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana
- g) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD).
- h) Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4 Isu – Isu Strategis

Pesatnya perkembangan dan penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti dan adanya berbagai kegiatan dibidang ekonomi, mempunyai implikasi yang luas dan diprediksikan akan muncul berbagai permasalahan sosial, perlindungan perempuan dan anak serta pengendalian penduduk yang semakin kompleks. Sebagian besar masyarakat kelas bawah kurang bahkan tidak memiliki akses terhadap gerak vertikal pembangunan ekonomi tersebut.

Sebagian masyarakat justru tertinggal oleh derap pembangunan. Kesenjangan sosial ekonomi, pengangguran dan keterbelakangan merupakan isu-isu sensitif dan kritis dalam tatanan sosial saat ini. Untuk itu pembangunan Bidang Kesejahteraan sosial tetap dikelola dengan mengacu kepada pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development) dalam konteks dan dinamika pembangunan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Secara umum isu-isu strategik yang dihadapi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti dan menyita perhatian adalah :

- a. Masih Tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), namun cakupan penanganannya (rehabilitasi,

- perlindungan, jaminan dan pemberdayaan sosial) masih rendah
- b. Belum optimalnya penanganan darurat bencana (bantuan pemenuhan kebutuhan pokok) dan pemulihan dampak bencana.
 - c. Tingginya kasus kekerasan perempuan dan anak termasuk TPPO
 - d. CPR Kb Aktif
 - e. Belum optimalnya Perlindungan dan pemenuhan hak anak
 - f. belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat
 - g. masih rendahnya peran aktif PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
 - h. Masih banyaknya masyarakat miskin dan KAT yang belum memiliki pemukiman yang layak
 - i. masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan dan akuntabilitas kinerja
 - j. masih rendahnya IMP yang terbentuk

1.5 Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
- 2) Undang-Undang Kementerian Kesejahteraan Sosial Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009);
- 4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 8) Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 9) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021
- 13) Perda Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
- 14) Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti

1.6 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis (*strategic plan*) merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada, sebagai dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

2.1 Rencana Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik regional maupun nasional dan internasional.

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti diawali dengan penetapan visi dan misi yang tidak terlepas dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan kedalam tujuan, sasaran dan strategi pencapaiannya dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan external, serta pemahaman terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang diidentifikasi melalui analisa SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*). Selain itu juga diperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan, untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat tercapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang realistis dengan membangun prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan atau kegagalannya.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti telah melibatkan pegawai di lingkungan Dinas yang menempatkan Rencana Strategis (Renstra) sebagai komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti beserta seluruh perangkat organisasinya untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintah dan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti mencakup tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran, dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan upaya pencapaian visi dan misi di atas, maka ditetapkan Tujuan yang akan dicapai sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan Pelayanan Pemerintah yang baik	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	70	80	85	90	90
2	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		Angka kemiskinan	30,89	30,80	29,84	28,02	27,15	27,15
		Meningkatnya penanganan terhadap PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	N/A	50	55	60	65	70
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Prevalansi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	N/A	0.175	0.232	0.289	0.346	0.403
			Proporsi Perempuan yang menduduki posisi Manajerial	N/A	53	55	57	59	61
		Menurunnya Angka Kelahiran Total	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,37	2,36	2,35	2,33	2,31	2,28

2.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA	
	SASARAN RENSTRA SKPD			ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN			
1	Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Kepmenpan No. 25 Tahun 2004	Hasil survai indek kepuasan masyarakat berdasarkan kepmenpan no 25 tahun 2004		Dinsos P3AP2KB	Sebagai bahan evaluasi pelayanan dalam meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat.
2	Meningkatnya penanganan terhadap PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	%	UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP No. 1 Tahun 2017 tentang SPM Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota, SPM Permensos 9/ HUK/2018,	Jumlah PMKS yang tertangani	x 100	Dinsos P3AP2KB	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
					Jumlah PMKS yang ada			
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	Prevalansi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	Permen PPPA No 01 Tahun 2010 dan Permen PPPA No 2 Tahun 2011	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun Lalu + Tahun Ini	x 100	Dinsos P3AP2KB	Mengurangi Kasus kekerasan terhadap perempuan anak sesuai dengan Permen PPPA No 01 Tahun 2010 dan Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2011
		Proporsi Perempuan yang			Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang			

		menduduki posisi Manajerial		Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional	Jumlah Pekerja Perempuan (Usia 18 Tahun Ke atas)		Gender dalam Pembangunan Nasional
4	Menurunnya angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	angka	RPJMN 2015 – 2019 Peraturan Kepala BKKBN Nomor 212/PER/BI/2015 tentang Renstra BKKBN 2015 – 2019	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{P_i f} \times K$	Dinsos P3AP2KB, BPS, SUSENAS, SDKI, BKKBN	TFR = Angka Kelahiran Total ASFR _i = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur b _i = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu p _i = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24,....., i=7 untuk kelompok umur 45-49 K = bilangan konstanta biasanya 1000

2.3 Perjanjian Kinerja 2018

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Perubahan Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	Percent (%)	80
2	Meningkatnya penanganan terhadap PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	Percent (%)	55
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan perlindungan anak	Prevalansi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Angka	0.232
		Proporsi Perempuan yang menduduki posisi Manajerial	Percent (%)	55
5	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,35

1) Program

Sebagai penjabaran atas arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran 2018, maka disusunlah program-program kerja yang tercakup dalam bidang kewenangan strategis dalam upaya untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, yaitu :

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.521.385.188
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 356.200.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.100.000.000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.90.779.241
5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp. 990.624.700
6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp. 239.278.100
7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial	Rp.400.358.573
8	Program Rehabilitasi Korban Bencana	Rp.47.095.000
9	Program Perlindungan Jaminan Sosial Keluarga	Rp.462.799.761
10	Program Penguataan Kelembagaan	Rp. 219.852.000

	Pengarustamaan Gender dan Anak	
11	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Rp. 259.020.000
12	Program Keluarga Berencana	Rp.2.656.650.868
13	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rp. 37.415.000
14	Program Pelayanan Kontrasepsi	Rp. 314.290.000
15	Program Pengendalian Penduduk	Rp.820.530.000
	JUMLAH	Rp.8.516.278.431

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kinerja Tahun 2018.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Red
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Green
> 100%	Melebihi Target	Blue

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Kepulauan Meranti
Tahun 2018**

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Blue
2	Baik	75.00 – 89.99	Green
3	Cukup	65.00 – 74.99	Yellow
4	Kurang	50.00 – 64.99	Orange
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Red

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2018 telah ditetapkan 4 (Empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target		Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2016	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
			angka	satuan					2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatkan Pelayanan Pemerintah yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	(%)	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase (%)	N/A	70	80	85	90	90	90%
2	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	29,84	(%)	Meningkatnya penanganan terhadap PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	Persentase (%)	N/A	50	55	60	65	70	70%
					Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Prevalansi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase (%)	N/A	0.175	0.232	0.289	0.346	0.403	0.403
						Proporsi Perempuan yang menduduki posisi Manajerial	Persentase (%)	N/A	53	55	57	59	61	61
					Menurunnya Angka Kelahiran Total	Angka Kelahiran Total (TFR)	Persentase (%)	2,37	2,36	2,35	2,33	2,31	2,28	2,28

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/ program sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan organisasi dalam rangka mewujudkan misi dan visinya.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Target 2017			Target 2018			Target S.d 2021
		Target	realisasi	capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	70%	75%	110%	80%	81%	102%	75 %
2	Persentase PMKS yang tertangani	50%	50%	100%	55%	60%	110%	40%
3	Prevalansi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	0,175	N/A		0.232%	0.232%	100%	0,403%
4	Proporsi Perempuan yang menduduki posisi Manajerial	53%	N/A		55%	55%	100%	61%
5	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,36	2,68	2,87	2,35%	2,62%	89%	2,28%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indicator Indeks Kepuasan Masyarakat capaian kinerja 102%, pada indicator Persentase PMKS yang tertangani dengan capaian kinerja 110 %.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indicator Prevalansi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan capaian kinerja 100%, pada indicator Proporsi Perempuan yang menduduki posisi Manajerial, dengan capaian kinerja 100 %.

Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indicator Angka Kelahiran Total (TFR), dengan capaian kinerja 89%.

3.3 Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016 - 2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 - 2021 sebanyak 4 (Empat) sasaran.

Tahun 2018 adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti dari 4 ((Empat) sasaran strategis dengan 5 (Lima) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut:

Pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap misi sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pencapaian Target Misi

No.	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1		-					
2	Misi 2							
3	Misi 3							
4	Misi 4	1	1	100%				
5	Misi 5	4	1	25%	2	50%	1	25%
6	Misi 6							
7	Misi 7							
	Jumlah							

Dari 4 sasaran dengan 5 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase
A.	Misi 1		
1	Melebihi/Melampau Target	-	
2	Sesuai Target	-	
3	Tidak Mencapai Target	-	
B.	Misi 2		
1	Melebihi/Melampau Target		
2	Sesuai Target	-	
3	Tidak Mencapai Target	-	
B.	Misi 3	-	
1	Melebihi/Melampau Target	-	
2	Sesuai Target	-	
3	Tidak Mencapai Target	-	
B.	Misi 4	1	
1	Melebihi/Melampau Target	1	
2	Sesuai Target	-	
3	Tidak Mencapai Target	1	
B.	Misi 5	4	
1	Melebihi/Melampau Target	1	
2	Sesuai Target	2	
3	Tidak Mencapai Target	1	

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir resntra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Sasaran I : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur

Capain Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2018 mencapai target yang telah diperjanjikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2021	%
			Target	Realisasi		Target	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	80	81	102	90	80
Rata-rata Capaian Kinerja					102		80

Sasaran Meningkatnya kinerja pelayanan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Capaian kinerja nyata

indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan mutu pelayanan kategori B (65,0) dari target nilai 65,0 (nilai interval 62,51-81,25) yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 102 % atau sesuai target yang diperjanjikan. Capaian ini lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari Tabel Berikut ini:

Tabel 3.6
Data Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun 2018

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Ket
1	Prosedur pelayanan	3	
2	Persyaratan pelayanan	3.05	
3	Kejelasan dan kepastian petugas	3	
4	Kedisiplinan petugas	2.9	
5	Tanggung jawab petugas	3.2	
6	Kemampuan petugas	3.1	
7	Keadilan mendapatkan pelayanan	2.75	
8	Kesopanan dan keramahan petugas	3.15	
9	Ketepatan pelaksanaan	3.15	
10	Kenyamanan lingkungan	3.25	
11	Keamanan pelayanan	3.1	
12	Kecepatan pelayanan	3.25	

Sumber : Data diolah (sesuai PermenPAN 25 Tahun 2004)

Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa capain INdeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2018 mengalami peningkatan. Beberapa kriteria dalam pengukuran Indeks kepuasan Masyarakat mendapatkan penilaian

yang cukup signifikan sehingga mempengaruhi pencapaian Nilai Indeks kepuasan Masyarakat Secara keseluruhan.

Tabel :
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Indeks
Kepuasan Masyarakat Tahun 2018 dan Tahun sebelumnya (2017)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	70	75	110	80	81	102
Rata-rata Capaian Kinerja					110			120

Dari table diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2017 yaitu 75 dengan target 70 atau 110 %. Sedangkan pada tahun 2018 capaian kinerja 81 dengan target 80 atau 102 %. Sehingga bias dikatakan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Mengalami Peningkatan ayau Lebih Baik baik dari tahun sebelumnya.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kinerja pelayanan didukung oleh program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan dengan kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, , Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyediaan Bahan Logistik

Kantor, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, Penyediaan Jasa Keamanan Kantor, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Output program dan kegiatan tersebut antara lain terlaksananya pelayanan publik dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.

Keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Adanya Dukungan Anggaran Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Adanya Komitmen dari Pimpinan OPD maupun Pimpinan Unit Organisasi
3. Adanya Komitmen seluruh ASN maupun honorer dalam memberikan pelayanan publik yang baik

Faktor Penghambat

1. minimnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai
2. masih rendahnya kompetensi SDM Aparatur
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti survey yang dilakukan dinas

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatkan Kinerja Pelayanan

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80	81	101,25	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.521.385.188	1.478.632.910	97,18	
							2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	356.200.000	350.040.500	98,27	
							3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000	99.952.856	99,95	
							4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90.779.241	84.836.200	93,45	
							RATA-RATA CAPAIAN DARI INDIKATOR				
TINGKAT EFISIENSI 10.87 %											
TINGKAT EFEKTIFITAS 101.80 %											

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Perbaikan sarana dan Prasarana pendukung kinerja Pelayanan
2. Peningkatan kompetensi Aparatur penyelenggara Pelayanan
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Penanganan Terhadap PMKS

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penanganan Terhadap PMKS dengan indikator Persentase PMKS yang tertangani dengan target 55 % melebihi target dengan capaian 60 % atau dengan capaian kinerja 110 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya Penanganan Terhadap PMKS

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2021	%
			Target	Realisasi		Target	
	Persentase PMKS yang tertangani	%	55	60	110	70	85,7
Rata-rata Capaian Kinerja					110		85,7

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa sasaran meningkatnya penanganan terhadap PMKS dengan indicator Persentase PMKS yang tertangani melebihi target yang telah diperjanjikan 55 % dengan realisasi

60 % atau dengan capaian kinerja 110 %. Selain itu, jika diperbandingkan dengan target jangka menengah maka dapat dilihat bahwa capaian indikator sasaran yaitu 85,7 % dari target jangka menengah.

Tabel :

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase PMKS yang tertangani Tahun 2018 dan Tahun sebelumnya (2017)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2018	%
			Target	Realisasi		realisasi	
	Persentase PMKS yang tertangani	%	50	55	109	60	110
Rata-rata Capaian Kinerja					110		118

Capaian Kinerja Sasaran pada indikator Persentase PMKS yang tertangani mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan target 50 %. Pada tahun 2018 capaian kinerja 60 % sedangkan capaian kinerja 110 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian indikator sasaran meningkatnya Penanganan terhadap PMKS mengalami peningkatan. Secara rinci jenis PMKS yang tertangani pada tahun 2018 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.15
Jenis PMKS yang Tertangani Tahun 2018

NO	JENIS PMKS	PMKS 2017	Kinerja 2018	Persentase (%)
1	Penyandang Disabilitas (Fisik, Motorik, Kejiwaan)	388	4	2,12
2	Komunitas Adat Terpencil	150	150	100
3	Orang Dengan Gangguan jiwa	24	24	100

4	Orang Terlantar	30	30	100
5	Lanjut Usia Terlantar	15	15	100
6	Korban tindak kekerasan	20	20	100
7	Korban Bencana	20	20	100
8	Fakir Miskin	30	30	100
9	Sosial Klien Anak (ABH, AT)	24	12	50
jumlah		501	305	60,87

Sumber: data Olahan Bidang Rehsos Linjamsos Dinas Sosial P3AP2KB

Sasaran Meningkatnya Meningkatnya penanganan terhadap PMKS dapat dilihat dari 1 (satu) indikator Persentase PMKS yang tertangani .Capaian kinerja nyata indikator Persentase PMKS yang tertangani dengan target 60,87 % dari yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebesar 55 %, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 110 % atau melebihi target yang diperjanjikan. Capaian ini lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya penanganan terhadap PMKS didukung oleh program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Program Rehabilitasi Korban Bencana, Program Perlindungan Jaminan Sosial Keluarga, dengan kegiatan:

1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemukiman Bagi Kelompok Keluarga Fakir Miskin

2. Pemetaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kabupaten Kepulauan Meranti
3. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
4. Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Kab. Kepulauan Meranti
5. Pelayanan dan Perlindungan Sosial Bagi Korban Tindak Kekerasan,
6. Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana,
7. Pemulang Orang Terlantar ke Daerah Asal,
8. Pengiriman dan Bantuan Sosial Klien.
9. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS (Bantuan Alat Bantu Diri)
10. Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)
11. Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
12. Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Kepulauan Meranti
13. Penyediaan Sarana dan Prasarana Syarikat Kematian Kabupaten Kepulauan Meranti
14. Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
15. Pendampingan Program Keluarga Harapan

Keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Penanganan PMKS disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Adanya Dukungan Anggaran Pelayanan Rehabilitasi terhadap PMKS
2. Adanya Komitmen dari Pimpinan OPD maupun Pimpinan Unit Organisasi
3. Adanya Koordinasi yang baik antara stakeholder

Faktor Penghambat

1. Minimnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai
2. Masih rendahnya kompetensi SDM Aparatur
3. Rendahnya partisipasi keluarga dalam mendampingi pasien Psikosis

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya Penanganan Terhadap PMKS, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.16
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Penanganan Terhadap PMKS

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Penanganan Terhadap PMKS	1.1	Persentase PMKS yang tertangani	%	55	60	110	1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	239,278,100	235,089,000	98,24
								2	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	990,624,700	988,079,700	99,74
								3	Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial	400,358,573	398,932,573	99,64
								4	Program Rehabilitasi Korban Bencana	47,095,000	44,740,000	94,99
								5	Program Perlindungan Jaminan Sosial Keluarga	462,799,761	458,447,700	99,05
										RATA-RATA CAPAIAN DARI INDIKATOR		
								TOTAL PER SASARAN	2,140,156,134	2,125,289,673	99,33	
TINGKAT EFISIENSI 43.87 %												
TINGKAT EFEKTIFITAS 146.12 %												

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Penanganan Terhadap PMKS, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan Rehabilitasi
2. Sosialisasi kepada masyarakat terkait layanan rehabilitasi yang diberikan OPD
3. Peningkatan kompetensi Aparatur penyelenggara
4. Peningkatan partisipasi masyarakat

Pada tahun 2018, PSKS aktif di kepulauan Meranti mengalami peningkatan yang signifikan. Peran aktif PSKS dapat dilihat dari banyaknya upaya – upaya yang dilakukan PSKS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018

NO	JENIS PSKS	SATUAN	AKTIF	TIDAK AKTIF	JUMLAH	PERSENT ASE (%)
1	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Orang	9	0	9	100,00
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Orang	35	66	101	34,65
3	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Orang	14	10	24	58,33
4	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Orang	6	9	15	40,00
5	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS/ Orsos)	Orang	2	0	2	100,00
6	Karang Taruna	Orang	9	92	101	8,91
7	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	Orang	4	6	10	40,00
8	Pekerja sosial profesional	Orang	44	0	44	100,00
	JUMLAH		123	183	306	40,20

Sumber: data Olahan Bidang FM Dayasos Dinas Sosial P3AP2KB

Sasaran 3 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 3.20
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2021	%
			Target	Realisasi		Target	
	Prevalansi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	0,232	0,232	100	0,403	50
	Proporsi Perempuan yang menduduki posisi Manajerial	%	55	55		61	
Rata-rata Capaian Kinerja							

Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dari 2 (dua) indikator Prevalansi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan Proporsi Perempuan yang menduduki posisi Manajerial. Capaian kinerja nyata indikator Prevalansi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah 0,232 % dari yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebesar 0,232 %, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100 %, sedangkan capaian kinerja indikator Proporsi Perempuan yang menduduki jabatan Manajerial adalah 55 % dari yang direncanakan atau diperjanjikan yaitu 55 % sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100 %. atau sesuai mencapai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja sasaran Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan dengan kegiatan P2WKSS dan Pembinaan Organisasi Wanita Kabupaten Kepulauan Meranti.

Keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja sasaran kesetaraan gender dalam pembangunan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Adanya Komitmen dari Pimpinan OPD maupun Pimpinan Unit Organisasi

Faktor Penghambat

1. Kegiatan advokasi Kelembagaan PUG belum dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran daerah
2. Pembinaan kelembagaan Forum Anak
3. Pendampingan kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
4. Kelembagaan PUG belum dilakukan advokasi lebih lanjut
5. Minimnya SDM Profesional dalam pembinaan Kelembagaan PUG

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.21
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.1	Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan dan anak	%	0,232	0,232	100	1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	219.852.000	201.023.805	91,49
		1.2	Proporsi Perempuan yang menduduki posisi Manajerial	%	55	55	100	2	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	259.020.000	255.954.000	98,88
		RATA-RATA CAPAIAN DARI INDIKATOR					100	TOTAL PER SASARAN		478.872.000	456.977.805	95,4
TINGKAT EFISIENSI 9.87 %												
TINGKAT EFEKTIFITAS 102 ,8 %												

Tabel 3.23
Kasus yang diselesaikan P2TP2A Tahun 2018

No	JENIS KASUS	JUMLAH	HASIL TINDAK LANJUT
1	KDRT	5 Kasus	Selesai
2	Kekerasan Seksual (Pemeriksaan, Pencabulan)	5 Kasus	selesai
3	Anak berhadapan Dengan Hukum (ABH) / Tawuran	8 Kasus	Selesai
4	Pencurian	2 Kasus	Selesai
4	Kekerasan terhadap anak (KTA)	1 Kasus	Selesai
5	Hak Asuh Anak	1 Kasus	Selesai
6	Narkoba	2 Kasus	Selesai
7	Prostitusi Online dan Eksploitasi Seksual	2 kasus	Selesai
8	Pencemaran nama baik	1 Kasus	Selesai
	JUMLAH	27 KASUS	

Sumber: Data Laporan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 3.24
Forum Anak Kabupaten Meranti Tahun 2018

No	FORUM ANAK	AKTIF	TIDAK AKTIF	PERSENTASE
1	KABUPATEN	1	-	
2	KECAMATAN	9	-	
3	DESA / KELURAHAN	1	105	
	JUMLAH	11	105	10,48

Sumber: Data Laporan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana pendukung pelayanan P2TP2A
2. Pencanaan Komitmen Kabupaten Layak Anak
3. Penguatan Forum Anak sampai Ke Desa
4. Sosialisasi kepada masyarakat terkait layanan perlindungan Perempuan dan Anak

Sasaran 4 Menurunnya Angka Kelahiran Total

Sasaran Menurunnya Angka Kelahiran Total dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu Angka Kelahiran Total. Capaian kinerja nyata indikator Angka Kelahiran Total adalah 2,62 dari yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebesar 2,35, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 89 % atau belum mencapai target yang diperjanjikan..

Tabel 3.25
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Menurunnya Angka Kelahiran Total

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2021	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2,35	2,62	89	2,28	
Rata-rata Capaian Kinerja					89		

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Angka Kelahiran Total di Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2018 masih tinggi. Capaian kinerja belum mncapai target yang direncanakan. Jika dibandingkan denga tahun sebelumnya atau tahun 2017, maka capaian kinerja Angka Kelahiran Total (TFR) adalah 2,68. Atau bisa dikatakan lebih baik dari tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut berupa penurunan angka 0,02 poin dari tahun 2017 sebesar 2,68. Untuk lebih jelasnya dapat dilihar dari tabel berikut :

Tabel :

Perbandingan Angka Kelahiran Total Tahun 2018 dan Tahun Sebelumnya
(2017)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2018	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2,38	2,68	82	2,62	89
Rata-rata Capaian Kinerja					82		89

Sumber : SDKI 2018

Selain itu, capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Angka Kelahiran Total dengan Indikator Angka Kelahiran Total (TFR) tahun 2018 jika dibandingkan dengan capaian kinerja Provinsi Riau dan Nasional, maka didapati bahwa capaian kinerja pada tahun 2018 lebih baik.

Tabel :
Perbandingan Angka Kelahiran Total (TFR) Kabupaten Meranti, Provinsi Riau dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Meranti		Riau		Nasional	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2,38	2,62	2,4	2,9	2,4	2,69

Sumber: BKBBN Perwakilan Riau

Selain perbandingan tersebut, perlu dilihat juga indikator lain yang mendukung capaian sasaran. Indikator tersebut antara lain Jumlah PUS yang mengikuti KB aktif, dan IMP aktif.

Tabel 3.26
Jumlah PUS yang mengikuti KB Aktif Tahun 2018

NO	TAHUN	PUS KB Aktif	JUMLAH PUS	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2018	25.768	47.221	54,57

Sumber: data Olahan Bidang Rehsos Linjamsos Dinas Sosial P3AP2KB

Tabel 3.27
Jumlah Institusi Masyarakat Pedesaan / Perkotaan (IMP) Aktif Tahun 2018

No	JENIS IMP	AKTIF	TIDAK AKTIF	JUMLAH DESA / KELURAHAN	PERSENTASE (%)
1	BKB	41	64	105	39,05
2	BKR	18	87	105	17,14
3	BKL	25	80	105	23,81
4	UPPKS	18	87	105	17,14

5	PiKR	20	85	105	19,05
6	PPKBD	11	94	105	10,48
	JUMLAH	133	497	630	21,11

Sumber: data Olahan Bidang Dalduk KB Dinas Sosial P3AP2KB

Sasaran Menurunnya Angka Kelahiran Total dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu Angka Kelahiran Total. Capaian kinerja nyata indikator Angka Kelahiran Total adalah 2,62 dari yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebesar 2,35, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 89 % atau belum mencapai target yang diperjanjikan..

Capaian kinerja sasaran Menurunnya Angka Kelahiran Total didukung oleh Program Keluarga Berencana, Program Kesehatan Reproduksi Remaja, dan Program Pelayanan Kontrasepsi dengan kegiatan:

1. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik),
2. Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) (DAK Fisik),
3. Penyediaan Jasa Petugas Lapangan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti,
4. Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB (DAK Fisik)
5. Pengadaan Sarana Pendataan (DAK Fisik)
6. Pembangunan/Alih Fungsi Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK Fisik
7. Ajang Prestasi Remaja,
8. Pembangunan/ Alih Fungsi/ Pembangunan Balai Penyuluhan KB (DAK Fisik)
9. Penyediaan Pelayanan KB Melalui TNI-KB Kesehatan.

Keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Adanya Dukungan Anggaran DAK Fisik dan Non Fisik
2. Adanya Komitmen dari Pimpinan OPD maupun Pimpinan Unit Organisasi
3. Adanya PKB dan PLKB Lini Depan
4. Terbentuknya Kampung KB di setiap Kecamatan
5. Tersedianya Gudang Obat dan ALKON

Faktor Penghambat

1. Minimnya jumlah PKB dan PLKB
2. Masih rendahnya PUS yang mengikuti KB aktif
3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam program KB

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.28
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Menurunnya Angka Kelahiran Total

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan						
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%			
1	Menurunnya angka Kelahiran total	4.1	Angka kelahiran Total	angka	2,35	2,62	89	1	Program Keluarga Berencana	2.656.650.868	2.605.024.468	98,05	
								2	Program pelayanan kontrasepsi	314.290.000	283.022.744	90,05	
									1	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	37.415.000	37.415.000	100,00
									2	Program Pengendalian Penduduk	820.530.000	768.762.615	93,69
		RATA-RATA CAPAIAN DARI INDIKATOR							108,70	TOTAL PER SASARAN		1.844.215.000	1.633.277.000
TINGKAT EFISIENSI 20.14 %													
TINGKAT EFEKTIFITAS 122.74 %													

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Perlunya penambahan jumlah PKB dan PLKB
2. Perlunya koordinasi yang baik dengan FASKES pelaksana layanan KB
3. Penyusunan Grand Desain Kependudukan dan KB Kabupaten
4. Peningkatan pembinaan IMP Desa / Kelurahan

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Kepulauan Meranti dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp.8.516.278.431,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.8.289.954.771,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 97,34%, ,-. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Tabel : Pagu dan Realisasi Anggaran
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PROGRAM	ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	%		PAGU	RALISASI	%
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81	102	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.1,521,385,188	Rp.1,478,632,910	97,18
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.356.200.000	Rp.350.040..500	98,27
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.100.000.000	Rp.99.952.856	99,95
						Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.90.779.241	Rp.84.836.200	93,45
2	Meningkatnya Penanganan Terhadap PMKS	Persentase PMKS yang Tertangani	55	60	110	Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial	Rp.400.358.573	Rp.398.932.573	99,64
						Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Rp.990.624.700	Rp.988.079.700	99,74
						Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp239.278.100	Rp235.089.700	98,24
						Program Rehabilitasi Korban Bencana	Rp.47.095.000	Rp.44.740.000	94,99
						Program Perlindungan Jaminan Sosial Keluarga	Rp.462.799.761	Rp.458.447.700	99,05

3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Prevalensi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	0.232	0.232	100	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp219.852.000	Rp201.023.805	91.43
		Proporsi Perempuan yang menduduki posisi Manajerial	55	55	100	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Rp.259.020.000	Rp.255.954.000	98.81
4	Menurunnya Angka kelahiran Total	Angka Kelahiran Total	2.35	2.62	89	Program Keluarga Berencana	Rp2.656.650.868	Rp2.605.024.468	98.05
						Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rp37.415.000	Rp37.415.000	100.00
						Program pelayanan kontrasepsi	Rp314.290.000	Rp.283.022.744	90.05
						Program Pengendalian Penduduk	Rp.820.530.000	Rp.768.762.615	93.69

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti ini disusun merujuk kepada Perencanaan Strategi (Renstra) Tahun 2016 - 2021 yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak

Dalam Tahun Anggaran 2018 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana, Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Secara umum pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bersumber dari dana APBD dan APBD-P, telah sesuai dengan Misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti serta mendukung kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Dari hasil evaluasi kinerja program, menunjukkan bahwa program yang dicanangkan telah memenuhi kriteria “**Berhasil**”.

Namun dibalik keberhasilan yang telah diperoleh oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti dalam upaya pembangunan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, masih ditemui beberapa permasalahan, diantaranya adalah :

- a. Masih Tingginya Angka PMKS skala Kabupaten namun penanganannya masih rendah.
- b. Masih Rendahnya capaian Penurunan Angka TFR
- c. Masih rendahnya kompetensi ASN yang menyelenggarakan pelayanan

- d. Minimnya sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan kepada masyarakat
- e. Pergantian pejabat yang menyebabkan terkendalanya pelaksanaan monitoring atas kinerja
- f. Perubahan aturan tentang perencanaan pembangunan sehingga menyebabkan perubahan perencanaan sampai ke tingkat daerah.

Dengan mengacu pada Misi RPJMD dan RENSTRA 2016 - 2021, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti, maka upaya-upaya ke depan yang perlu dilaksanakan adalah :

- a. Pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara kontinyu dan terintegrasi dengan pihak-pihak terkait dalam koridor renstra OPD yang akan dicapai.
- b. Perbaikan atau revisi Rencana Strategis (RENSTRA) sesuai dengan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten kepulauan Meranti.
- c. Peningkatan Kompetensi ASN mulai dari Perencanaan pembangunan hingga ASN Pelaksana Pelayanan kepada Masyarakat
- d. Peningkatan kualitas sarana dan Prasarana pendukung kinerja Pelayanan
- e. Pengelolaan Data Terpadu Akurat berbasis Teknologi Informasi sehingga pencapaian sasaran Strategis dapat dimonitor secara berkala.

DAFTAR TABEL

	Hal
2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Dinas Kabupaten Kepulauan Meranti	8
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	14
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2017.....	16
3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran Bappeda	19
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	22
3.3 Capaian Indikator Sasaran	25
3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran	26
3.5 Pencapaian target Misi	27
3.6 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran	27
3.7 Analisis Pencapaian Sasaran 1.....	28
3.8 Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan	29
3.9 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 1.....	31
3.10 Analisis Pencapaian Sasaran 2.....	32
3.11 Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan	33
3.12 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 2.....	36
3.13 Analisis Pencapaian Sasaran 3.....	38

3.14	Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan	39
3.15	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 3.....	41
3.16	Analisis Pencapaian Sasaran 4.....	42
3.17	Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan	43
3.18	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 4.....	46
3.19	Analisis Pencapaian Sasaran 5.....	48
3.20	Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan	49
3.21	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 5.....	51
3.22	Pagu dan Realisasi Anggaran	
3.23	Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi	53
3.24	Penyerapan Anggaran pada setiap Misi	55